

Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Barat

M. Fadhli Maulana¹, Ahmad Syukron Prasaja²

Institusi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi

Email: ¹fadhlimaulana693@gmail.com, ²syukronprasaja@uinjambi.ac.id

Article Info	Abstract
Article history: Published: Dec 17, 2023 Page: 40-45	<i>Perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Barat harus sesuai dengan kepentingan umum. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB 2018-2021, dengan sektor perdagangan, industri, dan pertanian menjadi prioritas. Metode penelitian LQ dan DLQ digunakan untuk menentukan sektor-sektor unggulan. Prioritas pembangunan ekonomi harus fokus pada sektor-sektor potensial.</i> Kata kunci: Perencanaan Pembangunan Daerah, Sektor Unggulan Metode LQ dan DLQ Pertumbuhan <i>The regional economic development planning for West Lampung Regency must align with public interests. Economic growth is measured through the Gross Regional Domestic Product (GRDP) from 2018 to 2021, with trade, industry, and agriculture sectors being the priorities. The LQ (Location Quotient) and DLQ (Dynamic Location Quotient) methods are used to identify key sectors. Economic development priorities should focus on these potential sectors.</i> Keywords: Regional Development Planning, Leading Sector LQ and DLQ Methods Growth

Copyright © 2023 OECONOMICUS Journal of Economics

Pendahuluan

Kemampuan menyusun kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan bersama merupakan tantangan besar bagi negara-negara berkembang di Indonesia. Caiden (1982) menyatakan

bahwa tujuan dari disiplin administrasi publik adalah untuk menangani masalah yang berkaitan dengan masalah sosial (public affair) dan mengarahkan perusahaan yang dikuasai masyarakat (public enterprise). Kebijakan publik yang terkait

Editorial Office:

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Email: oje@uinsby.ac.id

dengan pengelolaan sumber daya publik, penyediaan layanan publik, pengendalian aktivitas masyarakat, dan memastikan perdamaian dan keamanan biasanya berfokus pada kebijakan pembangunan negara berkembang. Di sisi lain, Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa pembangunan nasional sangat penting dan dapat dicapai melalui tiga (tiga) pendekatan:

pembangunan makro, pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Pembangunan makro mencakup tujuan dan upaya pencapaiannya di tingkat nasional (makro), dan realisasinya merupakan hasil dari berbagai kegiatan pembangunan di tingkat cabang dan daerah. Seberapa efisien dan berfungsinya sistem ketatanegaraan, baik pusat maupun daerah, dengan demikian menentukan seberapa baik pembangunan umum, khususnya peningkatan perekonomian, direncanakan dan dilaksanakan.

Menurut Tambunan (2001), meskipun proses pembangunan daerah lebih spesifik, namun tujuan pembangunan ekonomi nasional dan daerah sama pentingnya. Keunggulan komparatif, spesialisasi dan potensi ekonomi lokal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mencapai pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, pertambangan harus diprioritaskan dan pengembangan serta eksploitasi seluruh potensi ekonomi lokal (Arsyad, 1999). Pada masa otonomi, peran administrasi publik menjadi penting ketika memberi pemerintah daerah lebih banyak kekuatan untuk memenuhi potensi mereka, mengelola sumber daya alam mereka dan menetapkan prioritas program pembangunan ekonomi mereka.

Tidak ada satu daerah pun yang memiliki karakteristik yang sama dari segi

potensi ekonomi, sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat. Alhasil, perbedaan ini berdampak lebih besar pada warna perencanaan pembangunan daerah (Anggara dan Sumantri, 2016). Dengan metode ini, rencana pembangunan daerah dibuat dengan menggabungkan kepentingan pemerintah tingkat atas dan bawah, serta kepentingan sektoral dan sektoral, yang semuanya diatur dan diselaraskan dalam rencana yang sistematis dan dinamis. Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk merencanakan dengan baik dengan pemerintah daerah dan sektor pembangunan, yang penting baik di tingkat nasional maupun daerah (Hafizrianda dan Daryanto, 2010).

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, perencanaan pembangunan daerah adalah tahapan penyusunan prakarsa yang menggabungkan unsur-unsur pemangku kepentingan yang berbeda dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu daerah atau lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, tujuan perencanaan pembangunan daerah secara implisit adalah untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu. meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah kota membutuhkan sumber daya yang dikelola. Termasuk pemanfaatan sumber daya yang dinilai memiliki potensi untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Analisis PDRB Kabupaten Lampung Barat yang dilakukan untuk tahun 2018 dan 2021 menunjukkan pertumbuhan. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Berbagai sektor berkembang mendorong

pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, strategi sektor unggulan harus dievaluasi, yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam merencanakan pembangunan ekonomi daerah, sektor unggulan dapat diprioritaskan. Oleh karena itu, strategi perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi industrinya. Di Kabupaten Sidoarjo, sektor-sektor yang menjadi basis pembangunan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dan sektor unggulan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan metode Local Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ).

Kajian Pustaka

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa daerah di sekitar Kabupaten Sidoarjo atau Jawa Timur memiliki beberapa industri unggulan. Menurut Irmansyah (2019), data PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2015–2016 menunjukkan bahwa terdapat dua industri utama di Kabupaten Mojokerto yang perlu diprioritaskan yaitu real estate dan manufaktur. Hakim (2019) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga (tiga) cabang kepemimpinan di Kabupaten Gresik antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017:

industri manufaktur, industri pertambangan dan penggalian dan industri pasokan energi dan gas. Namun menurut Budi T (2019), terdapat empat (empat) sektor yang menopang Kabupaten Blitar di wilayah selatan Jawa Timur antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yaitu industri manufaktur; pertanian, kehutanan dan perikanan; Perdagangan besar dan

eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi. Dalam empat penelitian sebelumnya yang dilakukan di wilayah Mojokerto, Gresik, Bangkalan dan Blitar, penulis menekankan peran perencanaan pembangunan daerah dalam perekonomian. Rencana ini bertujuan untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan bersama sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Metode penelitian bersifat deskriptif-kuantitatif, artinya peristiwa digambarkan dengan angka atau peristiwa yang dialami subjek. PDRB Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung menjadi bahan penelitian pada tahun 2018 dan 2021. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu. H. data statistik berasal dari data sekunder yang tersedia melalui situs web Statistics Finland. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dengan menggunakan informasi yang tersedia di situs resmi BPS. Ini dilakukan dengan menggunakan penganalisa LQ dan DLQ. Metode tersebut meliputi desain, ukuran, kriteria dan metode pengambilan sampel, instrumen yang digunakan, serta prosedur pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2018 dan 2021 disajikan pada Tabel 1. PDRB Lampung digunakan sebagai pembanding dengan PDRB Kabupaten Lampung Barat. Secara riil, produksi produk domestik bruto Jawa Timur meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2021. Tiga (tiga) sektor yang mempengaruhi produk domestik bruto

provinsi Jawa Timur adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi industri, otomotif dan sepeda motor; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan di industri manufaktur. Dari 17 sektor saat ini, proporsi terkecil bertanggung jawab atas pasokan air, pengelolaan limbah, limbah, dan daur ulang.

Tabel 1. PDRB Prov. Lampung tahun 2018 dan 2021

No	Lapangan Usaha	2021	2018
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	67.996.350,79	66.941.020,15
2	B. Pertambangan dan Penggalian	12.816.976,32	13.684.535,07
3	C. Industri Pengolahan	46.351.003,21	43.218.138,58
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	402.618,24	397.452,24
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	272.881,89	230.689,00
6	F. Konstruksi	25.348.784,10	22.798.256,09
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.612.011,10	28.251.039,47
8	H. Transportasi dan Pergudangan	12.449.352,91	11.934.704,06
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.426.125,19	3.357.790,46
10	J. Informasi dan Komunikasi	13.816.189,27	11.137.429,55
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.207.171,63	4.784.083,49
12	L. Real Estate	7.426.513,62	7.045.413,59
13	M,N. Jasa Perusahaan	333.249,64	321.799,57
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.127.383,58	7.120.888,73
15	P. Jasa Pendidikan	7.486.890,97	6.554.417,33
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.788.283,80	2.249.067,21
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.154.524,96	2.135.261,92
18	PDRB	246.966.491,15	232.165.986,99

Sumber : BPS tahun 2023

Tabel 2 menunjukkan PDRB Kabupaten Lampung Barat tahun 2010 atas dasar harga konstan periode 2018 dan 2021. Bahkan produksinya meningkat dari tahun 2016 ke 2019 kecuali tahun 2020. Sektor-sektor yang menyumbang sebagian besar PDRB Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung adalah pertanian, kehutanan dan kehutanan. Konstruksi; baik grosir maupun eceran, reparasi mobil dan motor. Saat ini, proporsi terkecil dari 17 industri bertanggung jawab atas pengadaan listrik dan gas, penyediaan air, pengelolaan limbah, limbah, dan daur ulang.

Tabel 2. PDRB ADHK Kab. Lampung Barat tahun 2018 dan 2021

No	Lapangan Usaha	2021	2018
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2383,04	2368,07
2	B. Pertambangan dan Penggalian	113,80	109,26
3	C. Industri Pengolahan	250,46	208,52
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,93	0,70
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,71	4,86
6	F. Konstruksi	224,08	193,16
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	665,11	600,27
8	H. Transportasi dan Pergudangan	131,40	125,88
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56,15	53,04
10	J. Informasi dan Komunikasi	205,59	164,95
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	91,21	82,46
12	L. Real Estate	232,58	227,69
13	M,N. Jasa Perusahaan	8,78	8,22
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	316,68	269,87
15	P. Jasa Pendidikan	216,50	189,40
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,45	63,77
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	73,65	68,73
18	PDRB	5053,34	4738,88

Sumber : BPS tahun 2023

Analisis Static Location Quotient dan Dynamic Location Quotient

Hasil perhitungan dari analisis SLQ dan DLQ dapat dilihat pada Table 3. Bahwa sektor yang memiliki status potensial dan tertinggal adalah :

Potensial :

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- E. Pengadaan Listrik dan Gas.
- K. Jasa Keuangan dan Asuransi
- L. Real Estate.
- M,N. Jasa Perusahaan.
- O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
- P. Jasa Pendidikan.
- Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Tertinggal :

- B. Pertambangan dan Penggalian.
- C. Industri Pengolahan.
- D. Pengadaan Listrik dan Gas.
- F. Konstruksi.
- H. Transportasi dan Pergudangan.
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J. Informasi dan komunikasi.

Tabel 3. Hasil perhitungan SLQ dan DLQ PDRB tahun 2018 dan 2021

No	Lapangan Usaha	Status 2018 SLQ dan DLQ	Status 2021 SLQ dan DLQ
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Potensial	Potensial
2	B. Pertambangan dan Penggalian	Tertinggal	Tertinggal
3	C. Industri Pengolahan	Tertinggal	Tertinggal
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	Potensial	Potensial
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Potensial	Potensial
6	F. Konstruksi	Tertinggal	Tertinggal
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Potensial	Potensial
8	H. Transportasi dan Pergudangan	Tertinggal	Tertinggal
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tertinggal	Tertinggal
10	J. Informasi dan Komunikasi	Tertinggal	Tertinggal
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Potensial	Potensial
12	L. Real Estate	Potensial	Potensial
13	M,N. Jasa Perusahaan	Potensial	Potensial
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Potensial	Potensial
15	P. Jasa Pendidikan	Potensial	Potensial
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Potensial	Potensial
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	Potensial	Potensial

Sumber : Hasil pengolahan SLQ dan DLQ.

Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang diberikan, berikut adalah kesimpulan dari data yang disajikan:

1. PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan 2021, dengan dasar harga konstan tahun 2010, dapat dilihat dalam Tabel 1. Data ini digunakan sebagai pembandingan dengan PDRB Kabupaten Lampung Barat.
2. Produksi PDRB Lampung secara riil mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021.
3. Tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi industri otomotif dan sepeda motor, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Industri pengolahan juga menjadi sektor penting.
4. Dari 17 industri yang ada, sektor yang bertanggung jawab terhadap pasokan air, pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang merupakan bagian terkecil.
5. Tabel 2 menunjukkan PDRB Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2018 dan 2021 dengan dasar harga konstan tahun 2010. Produksi meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, kecuali pada tahun 2020.
6. Sektor yang memiliki andil besar terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan penggalian, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
7. Dari 17 industri yang ada, sektor yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik dan gas, pasokan air, pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang merupakan bagian terkecil.
8. Analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) menunjukkan sektor-sektor yang memiliki status potensial dan tertinggal. Sektor potensial antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
9. Sektor yang termasuk dalam kategori tertinggal adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, kesimpulan dari data yang disajikan adalah terdapat pertumbuhan riil dalam produksi PDRB Lampung dan PDRB Kabupaten Lampung Barat. Sektor-sektor seperti perdagangan, industri, dan sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB. Sektor yang bertanggung jawab atas pasokan air, pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang masih memiliki kontribusi yang kecil dalam struktur ekonomi. Analisis SLQ dan DLQ menunjukkan sektor-sektor potensial dan

tertinggal dalam pengembangan ekonomi daerah

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya dan Sumantri, Ii. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. CV. Pustaka Setia Bandung.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE UGM Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. (2004). *Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE UGM Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo menurut Lapangan Usaha 2018-2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur menurut Lapangan Usaha 2018-2021*. Badan Pusat Statistik Lampung.
- Berita Resmi Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
- Budi T, Kristian. Sektor Basis Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur: Analisis PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2010-2016. *Inovasi*. Vol 16 No 2.
- Caiden, Gerald E. 1982. *Public Administration*. 2nd Ed. Palisades Publishers California.
- Daryanto, Arief dan Hafizrianda. (2010). *Metode Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. IPB Press Bogor.
- Hakim, Abdul. (2019). Sektor Unggulan dan Pergeseran Sektoral Kabupaten Gresik 2011-2017 Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Regional. *OECONOMICUS Journal of Economics*. Vol 3 No 2.
- Irmansyah, Maulana. (2019). Analisis Sektor Unggulan Yang Ada Di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol 2 No 1.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997). *Administrasi Pembangunan*. LP3S Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Rohmah, Siti Nia dan Cahyono, Hendry. (2021). Analisis Sektor Ekonomi Potensial dan Pengembangan Wilayah Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015-2019. *Independent: Journal Of Economics*. Vol 1 No 2.
- Tambunan, Tulus H. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ghalia Jakarta.